

ANALISIS PENERAPAN SMART CITY DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016-2021

Bagus Utama Aditya Putera (Bagusputera123@gmail.com)

Teguh Yuwono (teguhyuwonos@gmail.com)

Nunik Retno H (nunikretnoherawati@lecturer.undip.ac.id)

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website: <https://fisip.undip>, email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan program *Smart City* di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan teori *Smart City* dalam menganalisis penerapan *Smart City* di Kabupaten Kendal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan *Smart City* serta mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat selama proses penerapan program *Smart City* Kabupaten Kendal berlangsung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, dan Ketua Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini menemukan upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan program *Smart City* di Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 terkait dengan penerapan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal terdapat empat variabel yang menjadi pokok dalam hal penerapan yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi. Kemudian *Smart City* di Kabupaten Kendal masuk kedalam karakteristik Smart City, diantaranya adalah *Smart Government*, *Smart Economy*, *Smart People*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, dan *Smart Living*. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penerapan *Smart City* juga menjadi sebuah penilaian terkait dengan penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal.

Kata Kunci : Smart City, Implementasi, Penghambat

ANALYSIS OF SMART CITY IMPLEMENTATION IN KENDAL DISTRICT 2016-2021

Bagus Utama Aditya Putera (bagusputera123@gmail.com)

Teguh Yuwono (teguhyuwonos@gmail.com)

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website: <https://fisip.undip>, email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses how the implementation of the Smart City program in Kendal Regency in 2016-2021. This study uses Policy Implementation theory and Smart City theory in analyzing the implementation of Smart City in Kendal Regency. The purpose of this study was to find out the efforts of the Kendal Regency Government in implementing Smart City and to find out the things that became obstacles during the process of implementing the Kendal Regency Smart City program.

This study uses a qualitative research method using interview techniques conducted with the Regional Secretary of Kendal Regency, Head of the Kendal Regency Communication and Information Office, and Head of the Application and Informatics Division of the Kendal Regency Communication and Information Office.

The results of this study found the efforts of the Kendal Regency Government in implementing the Smart City program in Kendal Regency in 2016-2021 related to the implementation carried out by the Kendal Regency Government, there were four main variables in terms of implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucracy. Then Smart City in Kendal Regency is included in the characteristics of Smart City, including Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, and Smart Living. Things that become obstacles in implementing Smart City are also an assessment related to the implementation of Smart City in Kendal Regency.

Keywords: Smart City, Implementation, Barriers

PENDAHULUAN

Kondisi Indonesia pada masa sekarang sangat berkembang dari masa ke masa, sebuah kemajuan yang signifikan di tunjukan oleh Pemerintah daerah hingga Pemerintah pusat dalam mengelola tata kelola Pemerintahan. Indonesia memang bisa terbilang cukup tertinggal dari Negara-negara maju lainnya apabila dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, bahkan bisa terbilang sudah cukup jauh tertinggal. Pada masa sekarang banyak Negara yang sudah mengimplementasikan penggunaan teknologi informasi dalam proses kemajuan negaranya. Penggunaan teknologi informasi ini bisa dikatakan sangat membantu Pemerintah dalam mengimplementasikan seluruh programnya, bisa dari sektor pelayanan publik, administrasi, hingga laju perekonomian. Di Indonesia sendiri mengapa bisa tertinggal jauh dari Negara lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia bergantung pada perkembangan manusia juga. Artinya adalah butuh penyesuaian tersendiri bagi sebuah teknologi untuk masuk ke Indonesia karena tidak semua masyarakat akan dapat menerima secara instan sebuah perkembangan yang signifikan. Perubahan suatu sistem yang dilakukan oleh Pemerintah ini tentunya mempunyai dasar tersendiri. Salah satunya adalah pertumbuhan penduduk di suatu kota yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan dari pertumbuhan alamiah bahkan migrasi penduduk yang terjadi ini

menjadikan suatu fenomena yang harus di perhatikan, selain itu adanya perubahan karakteristik pada wilayah pertanian menjadi perkotaan atau bisa di sebut dengan proses urbanisasi. Dalam penerapan konsep *Smart City* terdapat unsur-unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya *Smart Government*. Konsep *Smart Government* menyangkut salah satu unsur penting perkotaan, yaitu instansi Pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan fungsi teknologi informasi agar nantinya dapat diakses oleh yang berkepentingan dan dapat digunakan secara efektif dan efisien. *Smart City* di Indonesia bisa dikatakan sebuah dobrakan baru yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang kemudian di turunkan ke Pemerintah Daerah guna di terapkan di daerah masing-masing. Dalam hal ini Pemerintah daerah dapat terus untuk melakukan inovasi yang lebih luas lagi dalam hal penerapannya. Artinya inovasi ini tidak membatasi sebuah Pemerintah Daerah untuk mengembangkan segala program maupun program yang dibuat oleh Pemerintah Daerah khususnya. Dalam jurnal yang berjudul Pelayanan Publik Berbasis Humanistik Untuk Kesuksesan Reformasi Birokrasi dijelaskan bahwa teori menurut Stephen Ezell salah satu keuntungan konsep *Smart City* adalah dapat menciptakan perencanaan dan pengembangan kota layak huni yang lebih baik di masa depan, konsep *Smart City* juga membuat layanan *e-government* agar dapat lebih cepat implikasinya kepada masyarakat. Konsep *Smart*

City ini juga dapat membuat sistem transportasi lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakatnya, menciptakan rumah dan bangunan yang hemat energy dan lingkungan. Konsep *Smart City* juga nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada konsep ini terdapat beberapa sektor yang didapat dalam mengembangkan *Smart City* banyak hal positif dari pengembangan *Smart City* tersebut. Pemerintah daerah seharusnya mulai untuk merangkak naik dalam menuju proses pencapaiannya. Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwasannya *Smart City* tidak hanya tentang pembangunan teknologinya saja tetapi banyak aspek yang ada didalamnya yang dapat di kembangkan lagi. Diantaranya adalah pembentukan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni didalam bidangnya masing-masing, sehingga pada penerapannya akan berjalan lancar. Kemudian adalah membuat layanan yang berbasis *Smart City* sehingga pada nantinya memudahkan masyarakat mengakses segala kebutuhannya yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Tentunya setiap Pemerintah Daerah tidak semua mampu untuk menerapkan *Smart City* secara mandiri, perlu adanya contoh dan pelatihan secara langsung dari Pemerintah Daerah lainnya yang telah berhasil menerapkan *Smart City* di daerahnya sendiri. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yang terletak di Kabupaten Kendal, hal ini dilakukan oleh peneliti dikarenakan Kabupaten Kendal sendiri merupakan daerah yang secara letak geografis

bersebelahan dengan Kota Semarang sebagai pusat Kota di Wilayah Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang sendiri juga sudah lebih dulu menerapkan *Smart City* dan terbilang sudah baik dalam hal penerapannya. Adapun penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal sebagai bentuk perluasan dari Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal lainnya adalah di dalam RPJMD 2016-2021 ini terdapat isu strategis Kabupaten Kendal yang salah satunya adalah Pelaksanaan Sistem *E-Government* dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kendal. Dijelaskan di dalamnya bahwa kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam Pemerintahan Kabupaten Kendal dalam hal peningkatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dijelaskan kembali bahwa dengan meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT (teknologi informasi) dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan memiliki tujuan agar terbentuk Pemerintah Kabupaten Kendal yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja Pemerintah. Proses penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal secara langsung diawali dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan pada tahun 2018, hal ini di tandai dengan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Kota Semarang. Bentuk kerjasama ini dilakukan karena Kota Semarang telah lebih dulu menerapkan *Smart City* dan bisa disimpulkan bahwa Kota Semarang telah berhasil dalam hal penerapan *Smart City*. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Kendal menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sangat baik dalam mengambil arah kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Kota Semarang, langkah ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal serius guna menerapkan *Smart City* di Kabupaten Kendal. Dengan mengandalkan sebuah teknologi informasi komunikasi menurut peneliti akan mempermudah keberlangsungan prosesnya. Dapat dilihat beberapa daerah yang masih menggunakan model/cara tradisional masih mengalami kendala bagi Pemerintah maupun masyarakatnya, hal ini dapat di contohkan dengan sistem pembayaran pajak yang dapat dilakukan secara online, sehingga masyarakat tidak perlu repot untuk datang langsung ke kantor pajak. Contoh lainnya adalah ketika masyarakat membutuhkan sebuah informasi yang berkaitan dengan pemerintah bisa langsung mengakses secara online langsung. Pola seperti ini seharusnya dapat segera dihilangkan dan beranjak ke proses menyederhanakan sebuah cara sehingga dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Pengembangan *Smart City* ini memang di dorong untuk mendukung pelayanan publik sehingga dalam hal ini diharapkan masyarakat tidak lagi mengalami

sebuah kendala yang berarti. Tentu Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki alasan mengapa penerapan *Smart City* baru terealisasikan pada tahun 2018 dan penerapan *Smart City* yang telah dilaksanakan bisa di bilang belum maksimal. Untuk saat ini pun situs web yang telah di buat (<https://smartcity.kendalkab.go.id>) tidak bisa di akses kembali. Bahkan sebelum tidak bisa di akses situs web yang telah di buat pun hanya bisa diakses sampai dengan halaman awal saja. Sajian menu yang ada hanya sebagai hiasan, tidak bisa di akses secara langsung sesuai dengan kebutuhan di tambah dengan tidak adanya pembaruan. Sehingga untuk info-info yang ada didalamnya tidak terupdate secara berkala. Hingga pada saat ini situs web yang telah dibuat yaitu melalui (<https://smartcity.kendalkab.go.id>) sudah tidak dapat diakses, melainkan pada saat ini pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan situs web yang baru yaitu melalui (<https://www.kendalkab.go.id/>) yang penggunaannya sedikit berbeda daripada situs web sebelumnya. Mengenai keefektifitas pada situs web yang baru hingga saat ini telah memiliki banyak menu yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Kendal, sehingga dalam situs web tersebut menyajikan berbagai jenis pelayanan hingga informasi yang dibutuhkan. Dari penjelasan yang tertera di latar belakang sebelumnya dijelaskan bahwa situs web *Smart City* Kabupaten Kendal dalam hal ini masih dalam tahap peningkatan yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh

karena itu peneliti ingin mengetahui serta meneliti apa saja upaya atau tindakan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal dalam menerapkan *Smart City* Kabupaten Kendal serta apa saja hla-hal yang menjadi penghambat dalam proses penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal. Peneliti melihat terdapat hal menarik terkait dengan keberlangsungan dari penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal yang mana bahwa penerapan dari *Smart City* Kabupaten Kendal dari tahun 2016-2021 sudah sampai sejauh mana terkait dengan penerapan yang telah dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti hendak melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yang dibagi menjadi 2 rumusan. Diantaranya adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menerapkan *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 ?.
2. Apa saja yang menjadi penghambat serta kelemahan dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021?.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang sedang diamati (Bogdan & Taylor 1992:21). Maka dari itu dimungkinkan memperoleh pemahaman kenyataan yang sedang terjadi melalui proses berpikir induktif.

KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Pada setiap proses kebijakan tentu hal yang menentukan kebijakan itu berhasil atau tidak bergantung pada tahap implementasi kebijakannya. Dalam buku Kebijakan Publik yang ditulis oleh Handoyo menunjukkan beberapa pengertian mengenai implementasi kebijakan yang dapat diambil seperti halnya menurut Ponto, dkk (2016) “Implementasi kebijakan publik menenkankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu, kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukandalam keputusan kebijakan. Kemudian pengertian menurut Usman (2002) “Implementasi bermuara pada sebuah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem yang bukan hanya sekedar aktivitas tetapi sebuah tindakan yang terencana dan untuk mencapai sebuah tujuan”. Dalam penelitian ini teori implementasi yang gunakan yaitu pada teori model implementasi yang dikemukakan oleh David C. Korten

(Akib&Tarigan, 2008) menyebutkan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat. Yaitu kesesuaian antara apa yang di tawarkan oleh program dengan apa yang di butuhkan oleh kelompok sasaran. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang di isyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Pada dasarnya dalam hal ini implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi ketiga kriteria yang telah disebutkan diatas. Ketiga kriteria tersebut menjadi sebuah acuan yang dapat digunakan untuk mengukur pada penerapan kebijakan melalui implementasi kebijakan. Seperti halnya pengertian implementasi kebijakan menurut Mufizz yang dikuti dalam buku yang berjudul "Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)" menjelaskan bahwasannya implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kemudian terdapat model implementasi kebijakan yang memiliki sifat *top-down* (atas-bawah) yang dikenalkan oleh George C Edward III yang memiliki 4 variabel yang menjadi titik tentu sebuah

implementasi dapat dikatakan berhasil dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan empat variable yang ada, diantaranya adalah :

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya
- c. Disposisi
- d. Birokrasi

2. *Smart City*

Secara sederhana *Smart City* dapat diartikan sebagai kota pintar atau kota cerdas yang memberikan penwaran peningkatan kualitas hidup untuk masyarakat. *Smart City* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah konsep pembuatan rencana, penataan, dan pengelolaan terhadap sebuah kota yang menerapkan *Smart City* dimana didalamnya seluruh aspek yang tersirat didalam kehidupan saling terintegrasi. Dalam buku yang ditulis oleh Edi Surya Negara dengan judul "*Smart Government*" menjelaskan beberapa pendapat mengenai *Smart City* yang diantaranya adalah menurut Guido Perbiola bahwasannya *Smart City* merupakan bagian dari beberapa aspek yang dalam penggunaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung adanya sistem yang lebih efisien sehingga dapat saling terhubung antar satu sama lain dalam kehidupan sehari. Sedangkan menurut Washburn D menjelaskan bahwa *Smart City* merupakan sebuah cara untuk menggabungkan setiap

komponen penting dari suatu infrastruktur serta layanan yang ada dalam kota seperti halnya pendidikan, keselamatan publik, transportasi, administrasi, serta keperluan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *Smart City* menjadi sebuah bagian yang akan terus berdampak dengan kehidupan manusia sebagaimana akan terus berkembang untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Penerapan *Smart City* yang dilakukan pun akan terus menunjukkan sebuah terobosan baru yang akan terus berkembang menunjukkan eksistensinya. Adapun tujuan dari *Smart City* adalah untuk memberikan sebuah fasilitas dan kondisi dimana *Smart City* memberikan sebuah kondisi yang nyaman, aman, tentram, serta memiliki kekuatan ekonomi dan daya saing tersendiri. Sebagaimana pendapat dari Rudolf Giffinger dalam tulisannya mengenai *Smart City* di sejumlah kota besar di Eropa yang dikutip dalam buku "*Smart Government*" dijelaskan bahwa *Smart City* memiliki enam karakteristik yang menjadi dimensi yang menggambarkan kemampuan *Smart City* dalam mengelola potensi yang ada didalamnya. Dijelaskan enam karakteristik yang dimaksud sebagai berikut :

- a. *Smart Government*
- b. *Smart Economy*
- c. *Smart People*
- d. *Smart Mobility*
- e. *Smart Environment*
- f. *Smart Living*

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal dalam penerapan Smart City Kabupaten Kendal.

Penerapan program *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam pembuatan program murni dalam hal ini sebagai bentuk penerapan dari program *Smart City* Kabupaten Kendal. Seluruh program yang telah dirumuskan dan telah dijalankan tentu merupakan bagian dari elemen-elemen *Smart City* yang menjadi sebuah pokok dari terciptanya *Smart City* itu sendiri. Menurut Guido Perbiola yang dikutip dalam buku yang berjudul "*Smart Government*" menjelaskan bahwa *Smart City* merupakan bagian dari aspek yang penggunaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung dari sistem yang dijalankan, sehingga menciptakan pemanfaatan yang efisien dan dapat terhubung antar satu sama lain. Oleh karena itu, program-program yang telah diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi satu sama lain yang terhubung langsung menjadi sebuah satu kesatuan ke dalam sebuah situs web yang manaungi seluruh bagian dari OPD sehingga dalam hal ini seluruh OPD dan masyarakat dapat mengakses

secara langsung untuk mendapatkan manfaat yang dibutuhkan. Pembangunan situs web pada *Smart City* Kabupaten Kendal telah dilakukan selama dua kali yang pertama ada pada Situs web <https://smartcity.kendalkab.go.id> yang sudah tidak bisa diakses kembali dan diganti menjadi <https://kendalkab.go.id>. Pada situs web yang sekarang isi tampilan pada halaman depan memberikan banyak fitur menu yang dapat diakses untuk menuju ke tujuan yang dihendaki seperti halnya pada gambar dibawah menunjukkan tampilan menu pembuka pada situs web kendalkab.go.id terdapat beberapa menu yang berupa menu pertama yaitu bagian pemerintahan yang berisi pengenalan pimpinan daerah, menyajikan visi dan misi Kabupaten Kendal, Forkompimda, struktur Pemerintahan, BUMD, Pemerintahan Desa, dan prestasi serta penghargaan. Menu selanjutnya adalah tentang Ngenal Kendal yang berisi sejarah Kabupaten Kendal, Lambang Kabupaten Kendal, letak geografis, dan peta Kabupaten Kendal. Selanjutnya mengenai informasi Kendal yang berisi daftar penginapan, rumah makan, dan pusat perbelanjaan, kemudian bagian investasi yang berisi tentang industry, pariwisata, daerah pengembangan usaha, dan daftar ukm Kabupaten Kendal. Pada situs web <https://kendalkab.go.id> pada halaman awal tidak banyak

menampilkan menu yang telah disebutkan sebelumnya tetapi terdapat menu lainnya yang berupa fitur yang dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik yang dinamakan “Suara Warga” yang telah disediakan pada halaman awal. Selain fitur “Suara Warga” juga terdapat informasi mengenai agenda Bupati, agenda Wakil Bupati, dan agenda Sekda. Serta disediakan semacam berita daerah yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Fitur menu selanjutnya adalah terdapat akses untuk mengetahui informasi perkembangan pandemic covid-19 yang tersebar diwilayah Kabupaten Kendal, informasi investasi melalui DPMPTSP Kabupaten Kendal, system informasi geografis, informasi kependudukan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), JDIH Kabupaten Kendal, pengadaan barang jasa, *open data*, dan radio swara Kendal. Berbagai fitur menu yang disajikan memberikan banyak informasi dan kegunaan dalam fungsinya masing-masing. Namun dalam temuan yang dilakukan beberapa fitur masih memiliki kelemahan seperti halnya tidak dapat diakses dan tidak terupdate secara *real time* yang memang seharusnya beberapa informasi harus disajikan secara berkala.

Peneliti dalam hal ini telah membagi seluruh program yang diterapkan terkait dengan penerapan *Smart City* kedalam karakteristik menurut bagian dari *Smart City*, mengacu pada pengertian *Smart City* menurut Rudolf Giffinger yang dikutip dalam buku berjudul “*Smart Government*” dijelaskan bahwa dalam *Smart City* memiliki enam karakteristik yang menjadi sebuah dimensi tersendiri sehingga tercipta kemampuan masing-masing dari elemen tersebut untuk mengelola potensi yang ada didalamnya. Berikut merupakan elemen-elemen *Smart City* yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam *Smart City* Kabupaten Kendal yang juga menjadi program-program pendukung dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Smart Government*
- b. *Smart Living*
- c. *Smart Branding*
- d. *Smart Society*
- e. *Smart Environment*
- f. *Smart Economy*

Penghambat Penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021

Dibawah ini peneliti menemukan terkait dengan penerapan *Smart City* terdapat faktor penghambat penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal diantaranya adalah :

- a. Situs web *Smart City* belum berjalan secara optimal. Keberlangsungan penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal yang telah direncanakan sejak tahun 2016 dan mulai berjalan atau beroperasi sejak tahun 2018 ini telah memperlihatkan akan banyaknya hasil-hasil dari bagian pelaksanaan *Smart City*. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Bidang Aplikasi dan Informatika bahwasannya *Smart City* tidak hanya tentang teknologi melainkan semua hal dalam kehidupan yang berguna bagi makhluk hidup itu merupakan bagian dari *Smart City* yang membedakan adalah metode seperti apa yang digunakan. Dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal yang paling menonjol adalah penerbitan situs web yang memang khusus untuk memberikan informasi serta memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu contoh situs web yang telah dibentuk oleh Pemkab Kendal adalah (<https://smartcity.kendalkab.go.id>). Didalam situs web tersebut memberikan segudang informasi yang meliputi seluruh bagian dari *Smart City* itu sendiri, seperti *Smart Government*, *Smart People*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, dan *Smart Environment*. Situs web yang

telah dibuat tersebut sudah memiliki isi yang sudah begitu jelas sesuai dengan fungsi dan penggunaannya masing-masing. Namun situs web yang telah dibuat tidak bisa digunakan secara optimal, hal ini dikarenakan tidak berfungsi dan tidak terupdate secara berkala sehingga menjadi mati seolah tidak digunakan kembali. Lambat laun situs web yang telah dibuat ini sudah dihapus oleh Diskominfo karena agar penerapan *Smart City* bisa berpusat pada situs web resmi Pemkab Kendal. Situs web yang sekarang digunakan adalah <https://www.kendalkab.go.id/> yang bergabung menjadi satu dengan situs web resmi Kabupaten Kendal. Didalam situs web tersebut sudah berisi dengan berbagai informasi dan pelayanan yang telah disediakan oleh Diskominfo sebagai leader dan pengelola penerapan *Smart City* kabupaten Kendal.

- b.** Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan Kapasitasnya.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu kegiatan. Unsur dari SDM ini sangat berpengaruh dan menjadi suatu keharusan dalam upaya pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Wardhana dalam Munandar (2001) sumber daya manusia

mencakup seluruh energy yang ada seperti ketrampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang digunakan untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Dalam keberlangsungan organisasi pemerintah peran SDM sangat perlu ada dan harus sesuai dengan tugasnya masing-masing, hal ini sebagai bentuk bahwa ada sebuah hal yang harus dicapai bersama dalam menuju satu tujuan bersama. Selain peran dari SDM didalam organisasi pemerintah yang menjadi suatu elemen yang penting, peran masyarakat juga diperlukan sebagai pendukung dan yang menjalankan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan itu sendiri. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya kekurangan sumber daya manusia di pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal pelaksanaan *Smart City* masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitasnya, artinya sumber daya manusia pada bidang pengemangan teknologi masih dibutuhkan karena Kominfo Kabupaten Kendal tidak cukup memiliki sumber

daya manusia yang memiliki keahlian dibidang pengembangan teknologi. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa pengembangan penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal terbilang belum cukup maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitasnya.

- c. Refocusing anggaran terkait penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal kearah khusus penanggulangan pandemi virus Covid-19.

Awal tahun 2020 seluruh dunia mengalami sebuah fenomena besar yang mengakibatkan seluruh Negara harus pandai dalam mengelola fenomena tersebut. Pandemi Covid-19 yang timbul pada awal tahun 2020 ini menjadi sebuah fenomena yang buruk, berawal dari kemunculan virus Covid-19 di salah satu provinsi di Negara China yaitu Wuhan. Penyakit yang disebabkan oleh adanya virus yang berasal dari hewan ini dapat menyerang manusia secara cepat bahkan dapat mengakibatkan kondisi buruk bagi penderita sehingga banyak Negara diseluruh dunia khususnya Indonesia sendiri harus bisa menghadapi badai penyebaran virus Covid-19 ini agar tidak menyebar dan merajalela di wilayah Indonesia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia pada akhirnya telah ada pada Bulan Maret 2020 hal ini menandakan bahwa pemerintah wajib membuat banyak peraturan maupun tindakan demi meredam menyebarnya virus Covid-19 ini agar tidak menyebar kesluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan hal ini maka akan banyak hal-hal yang tidak terduga yang menjadi focus tersendiri bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah dalam hal anggaran yang sudah ada berubah drastic guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19 ini. Secara garis besar bahwa pemerintah pusat telah melakukan perombakan secara besar terkait dengan penyesuaian APBN yang telah dilakukan, perlu diketahui bahwa kondisi APBN pada tahun 2019 sejumlah Rp 1.676,7 triliun menurun tajam menjadi sebesar Rp 1.423 triliun. Sebaliknya terjadi peningkatan belanja Negara yang meningkat dari Rp 2.046,6 triliun menjadi sebesar Rp 2.306,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran Virus Covid-19 telah mengganggu kondisi perekonomian dan keuangan Negara Indonesia. Peningkatan belanja Negara ini sebagai bentuk pemerintah menghadapi gelombang penyebaran virus

Covid-19, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah pembelian obat-obatan, pengadaan fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan darurat, kemudian pembagian bansos kepada masyarakat. Refocusing anggaran ini juga berpengaruh ke pemerintah daerah sebagaimana dalam Inpres No.4/2020 yang telah diterbitkan pada Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo yang membahas mengenai refocusing anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh Menteri, Pimpinan, Gubernur, Bupati, Walikota. Menurut daripada inpres No.4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kendal menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat Untuk Keperluan Mendesak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 Melalui Refocusing Kegiatan dan Perubahan Alokasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020. Dijelaskan dalam Bab

II Tentang Pendanaan Keadaan Darurat Pasal 2 ayat 1 yang berisi bahwa Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak dalam rangka pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan Covid-19 melalui Refocusing kegiatan dan perubahan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 32.785.269.105,00 dengan melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan memanfaatkan uang kas yang ada. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya penyebaran Virus Covid-19 ini memang cukup terasa seperti bagian kesehatan hingga mempengaruhi seperti perkembangan perekonomian sehingga dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berjabaku untuk melakukan segala cara pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Virus Covid-19 di wilayah Indonesia khususnya. Terkait dengan pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kendal pun merasakan dampak terkait dengan refocusing anggaran dari pemerintah daerah, terkait dengan pelaksanaan tentunya memerlukan

pengadaan barang dan jasa dalam mendukung proses keberlangsungan pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Kendal.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkembangan *Smart City* Kabupaten Kendal menunjukkan peningkatan yang baik selama dijalankan sejak tahun 2018 yang bermula pada program Gerakan 100 *Smart City*. Karena penerapan *Smart City* membutuhkan banyak persiapan dan perencanaan yang matang serta tindakan yang kompeten dari pemerintah Kabupaten Kendal maka penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal pada Tahun 2016-2021 belum terlaksana secara optimal, sehingga perlu adanya evaluasi yang mendalam. Dan juga penerapan *Smart City* yang telah dilaksanakan hingga saat ini belum memberikan hasil sebagai pemanfaatan secara langsung dikarenakan situs web yang telah dibuat sebagai wadah *Smart City* Kabupaten Kendal belum bisa beroperasi secara optimal. Faktor pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi dinilai perlu untuk ditingkatkan kembali karena dalam hal ini *Smart City* tentu berdampak dengan

penmanfaatan teknologi yang maju. Kemudian dalam hal penerapan program-program yang terkait dengan penerapan *Smart City* tentu perlu ditingkatkan kembali karena masih ditemukan beberapa program yang belum berjalan dan belum terintegrasi dengan maksimal sehingga akan menjadi penghambat dalam penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal.

Saran

Adapun terdapat rekomendasi dari peneliti yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Perlunya memaksimalkan peningkatan program-program yang telah disusun dan direncanakan agar dapat berjalan secara baik. Sehingga penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal dapat benar-benar dimanfaatkan dari keseluruhan program tidak hanya sebagiannya saja yang bisa dimanfaatkan. Kemudian perlu adanya payung hukum yang mengatur mengenai penerapan *Smart City* kabupaten Kendal sehingga dalam penerapannya mempunyai kekuatan hukum dan tanggungjawab tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program *Smart City* secara lebih baik lagi. Kemudian perbaikan dari segi sosialisasi juga sangat perlu

dilakukan untuk mendukung penerapan *Smart City* Kabupaten Kendal sehingga seluruh OPD dan masyarakat mengetahui dan memahami apa saja program yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini Murni. 2017. Strategi Pemerintah Kota Menuju Cilegon *Smart City*. Serang. Jurnal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Edi Surya Negara. Smart Government. Palembang. Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Bima Darma.
- Hamrun dkk. Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Juli-Desember 2019. Vol 18 No 2.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik: Semarang. Widya Karya.Siti widharetno Mursalim. 2017. Implementasi Kebijakan *Smart City* Di Kota Bandung. Bandung. Universitas Sangga Buana. Vol 14. No 1.
- Handrisal, Ranggi Ade Febrian. 2018. Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 3 No 01.
- Herdiana Dian. 2018. Sosialisasi Program Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar. Cimahi. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik. Vol 1 No 3.
- Kurnia Putri Mirani. 2021. *The Government's Fiscal Policy Strategy To Improve The Economy Of Indonesia In The Covid-19 Pandemi Period*. Jakarta. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 5 No 2 2021 (193-204).
- Meita Santi Budiani. Perbandingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pemerintah Dan Non Pemerintah. Surabaya. Prodi Psikologi Universitas Negeri Surabaya.
- Moh Yunus, Andi Risma J. Metode dan Model Pengambilan Keputusan. Indramayu. CV.Adanu Abimata. 354/JBA/2020.
- Muhammad Khozin, Nur Faidati, Yogyakarta. Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (*Smart City*) Studi Kasus Kota Yogyakarta.

Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 03 Nomor 2 Hal
171-180.

Muhammad Ramli. 2017.
Kepemimpinan Inovatif
Dalam Implementasi
Program Strategis
Pemerintah Kota
Makassar. Jurnal Politik
Profetik Volume 5
Nomor 2.

Mujiyono, Siti Nurhayati
dkk. 2016. Kesiapan
Kota Pekalongan Menuju
Smart City. Dewan Riset
Daerah Kota Pekalongan.
Vol 11.

Mustopa Haris, Riyanto Adi
2017. Implementasi
Konsep *Smart City* Dalam
Aspek Lingkungan Studi
Kasus: Kota Cimahi.
Jurnal Universitas
Terbuka No 7297.

Neneng Siti Maryam. 2016.
Mewujudkan Good
Governance Melalui
Pelayanan Publik. Jurnal
Ilmu Politik dan Ilmu
Komunikasi. Volume VI
No 1.

Nugrahani, Farida. 2014.
Metode Penelitian
Kualitatif dalam
Penelitian Pendidikan
Bahasa. Surakarta Solo:
CakraBooks.

Priskadini April Insani.
2017. Mewujudkan Kota

Responsif Melalui *Smart
City*. Dalam Jurnal
Unmer. 2(1), 1-7.

Priskadini April Insani.
2017. Mewujudkan Kota
Responsif Melalui *Smart
City*. Dalam Jurnal
Unmer. 2(1), 1-

Sedjati, Sri, Rejati. 2015.
Manajemen Strategis:
Yogyakarta. Deepublish.
Handoyo, Eko. 2012.
Program Publik:
Semarang. Widya Karya.

Subarsono. 2011. Analisis
Program Publik (konsep,
teori, dan aplikasi).
Yogyakarta. Pustaka
Pelajar.

Trimurti Ningtyas. 2017.
“Pelayanan Publik
Berbasis Humasistik
Untuk Kesuksesan
Reformasi Birokrasi”.
Dalam Ejournal
Unitomo, 1(1), 1-12.